



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FITRANO JAYA PUTRA ASKARI S.IP
2. Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN
3. NHK : 227103

**II. DATA HARTA**

	Rp.	1.210.965.000
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.210.965.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/228 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.210.965.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	245.000.000
1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN 300E Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	337.392.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.848.857.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.109.877.309</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>738.979.691</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.